

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL
(POPM) KAKI GAJAH (FILARIASIS) DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Oleh :

**Ramiza Safitri (1401121399)
ramizasafitri@gmail.com**

pembimbing: Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Health in social life is a prosperous state of body, soul, and social that allows every person to live socially and economically productive, where the position of health is very important in improving the life of society. The prevention and elimination of elephantiasis is now a concern of the Government and is one of the disease control programs that should be pursued in a more systematic and sustainable manner. Filariasis or better known also elephantiasis disease is a chronic infectious disease that is always present in the tropics caused by filaria worm infection. The Filariasis Prevention Bulk Drug Program (POPM) is an action that prioritizes people's safety above individual interests. The purpose of this research is to see how the implementation of the program of drug prevention of bulk (POPM) of elephantiasis (filariasis) in Pangko pusako district of Rokan Hilir district. The concept of theory used is, the implementation proposed by Edward III which says that there are four variables that determine the successful implementation of a policy, namely: Communications, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research uses qualitative method with descriptive data. In collecting data of researcher use purposive sampling method as source of information and data analysis with triangulation technique. The results showed that the implementation of the program of prevention of bulk foot (elephant) foot mass (filariasis) in Bangko Pusako district of Rokan Hilir district has been running well, but only the lack of comprehensive socialization or counseling in the implementation. In addition, the community should also be the target group of the program has awareness to take the drug, so that the program can be done as expected.

Keywords : Implementation, medicine, Filariasis

Latar Belakang

Kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dimana posisi kesehatan sangatlah penting dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Kesehatan merupakan salah satu pembangunan nasional yang diutamakan.

Penanggulangan dan eliminasi penyakit kaki gajah saat ini telah menjadi perhatian Pemerintah dan merupakan salah satu program pengendalian penyakit yang harus terus diupayakan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk itulah Kementerian Kesehatan membuat program kerja lima tahunan agar tujuan dan sasaran bisa tercapai sesuai harapan dan mampu memberikan kontribusi mencapai eliminasi filariasis di dunia.

Terdapat produk hukum berupa dokumen penting dikeluarkan pemerintah dan merupakan dasar pelaksanaan program eliminasi filariasis. Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) 2005 – 2009 telah menetapkan eliminasi filariasis sebagai salah satu prioritas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Selanjutnya program eliminasi Filariasis ini diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 94 Tahun 2014 tentang penanggulangan Filariasis.

Secara umum, tujuan program eliminasi filariasis mengacu kepada tujuan pembangunan kesehatan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan kesadaran, kesediaan dan kemampuan untuk hidup sehat tiap individu agar terwujud tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan umum dari program

eliminasi filariasis adalah agar filariasis tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan tujuan khusus program adalah menurunkan angka mikrofilaria menjadi kurang dari 1 persen di setiap kabupaten/kota, serta mencegah dan membatasi kecacatan karena filariasis.

Manfaat Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) bagi Masyarakat adalah untuk dapat mencegah penularan penyakit secara menyeluruh karena belum seluruh masyarakat terlindungi. Untuk itu, pelaksanaan POPM filariasis perlu direncanakan secara komprehensif dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis merupakan tindakan yang mementingkan keselamatan rakyat banyak diatas kepentingan individu.

Dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) ini terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu dari kelompok sasaran yang menerima program filariasis. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meminum obat tersebut. Sementara program ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan orang banyak. Tapi pada kenyataannya belum seluruh masyarakat yang meminum obat yang diberikan tersebut.

Pelaksanaan dalam program ini yaitu dari Dinas Kesehatan kepada pihak Puskesmas dan pihak Puskesmas menunjuk kader-kader dalam melaksanakan atau memberikan obat kepada seluruh masyarakat atau penduduk sasaran. Sebelumnya pihak puskesmas memberikan pelatihan kepada para kader terlebih dahulu tentang tata cara pemberian obat filariasis tersebut. Pelatihan tata cara pemberian obat filariasis ini bertujuan agar para kader yang telah di tunjuk di setiap posyandu tidak mengalami permasalahan seperti salah memberikan obat kepada masyarakat.

Pelatihan ini bermanfaat bagi para kader mendapatkan ilmu dan mampu menerapkannya ketengah masyarakat.

Dari total keseluruhan penduduk yang minum obat di Puskesmas Bangko Pusako dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di mana jumlah penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berjumlah 99.137 dan jumlah penduduk sasaran yang diberikan obat tersebut berjumlah 86.461 orang sedangkan jumlah penduduk yang minum obat dari jumlah penduduk sasaran berjumlah 78.173 orang. Pada kenyataannya dari jumlah tersebut masih terdapat masyarakat yang belum mengkonsumsi obat filariasis tersebut. hal ini ditandai pada tahun 2015 merupakan penduduk sasaran terbanyak dalam program tersebut dan pada tahun 2015 itu merupakan penduduk terbanyak yang belum mengkonsumsi obat tersebut dari jumlah penduduk sasaran yaitu berjumlah 3.246 penduduk.

Sedangkan dari tahun 2012-2016 jumlah penduduk yang tidak meminum obat tersebut dari jumlah keseluruhannya yaitu berjumlah 8.288 penduduk. Dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang belum mengkonsumsi obat filariasis tersebut menyeluruh, maka pihak puskesmas di kecamatan Bangko Pusako bersemangat untuk melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal ini.

Penyakit filariasis mempunyai gejala klinis akut serta kronis. Filariasis akut diandai dengan gejala demam berulang selama 3 – 5 hari. Demam dapa hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat. Pembengkakan kelenjer getah bening (tanpa ada luka) di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas dan sakit. Diikuti dengan radang saluran kelenjer getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan yang dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Pembesaran tungkai, buah dada, dan buah

zakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas (Early lymphodema).

Sejauh ini masih terdapat penduduk yang terkena filariasis, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2012-2016 penduduk terbanyak yang terkena filariasis tersebut terdapat di dua desa yakni desa Teluk Bano I dan desa Sungai Manasib, dua desa tersebut terletak di Kecamatan Bangko Pusako, jadi itulah alasan peneliti memilih Kecamatan Bangko Pusako. Penanganan yang diberikan dengan pemberian obat selanjutnya dan yang terkena diberikan obat khusus. Selain itu juga terdapat kendala dalam pemberian obat kaki gajah (filariasis) tersebut, saat obat sudah diberikan kepada masyarakat, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau untuk meminum obat tersebut karena masyarakat masih merasa takut.

Hal ini di karenakan masyarakat belum tau manfaat dari obat tersebut. Sementara penyakit ini sangat berbahaya. Program ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari penyakit kaki gajah atau membebaskan masyarakat dari filarasis. Karena jika masyarakat terjangkit penyakit ini maka sangat susah untuk diobati atau disembuhkan.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti bermaksud ingin mengkaji tentang **Implementasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kaki Gajah (Filariasis) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kaki Gajah (Filariasis) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?

Konsep Teori

Menurut Edward III dalam Agustino (2014:149) , terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Edward dalam Nugroho (2014:673), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif.
3. Disposisi, berkenaan dengan kesediaan dari para impementor untuk melakukan kebijakan pubik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komimen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Di samping itu Abadi dalam Jones (2012:19) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur- prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlkan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan dan dirincikan dalam sebuah proyek-proyek yang didukung oleh anggaran namun sebaik apapun program tanpa adanya implementasi tidak akan

mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai.

Filariasis atau yang lebih dikenal juga dengan penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang selalu terdapat di daerah tropis disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Penyakit ini ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk diantaranya *Anopheles*, *Culex*, *Mansonia*, dan *Aedes*. Terdapat tiga spesies cacing penyebab Filariasis yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi*, *Brugia timori*. Cacing tersebut hidup di kelenjar dan saluran getah bening sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik yang dapat menimbulkan gejala akut dan kronis seperti pembesaran abnormal bagian tubuh, menyebabkan rasa sakit, cacat dan stigma sosial.

Obat filariasis yang bisa diberikan adalah Dietilkarbamazin (DEC), Ivermectin (Mectizan), dan Alendazol 400 mg dosis tunggal.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sisem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tentang Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kaki Gajah (Filariasis).

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2014 : 85). Penulis memilih informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelola Program Filariasis di Kecamatan Bangko Pusako
2. Bidan Desa (Posyandu)
3. Masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako
4. Penderita Filariasis

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, mengenai implementasi program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) di kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir dengan informen penelitian pengelola program filariasis dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung di dapat melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, juga mendapatkan data berupa jurnal, skripsi, tulisan-tulisan seputar masalah penelitian dari media-media lokal maupun nasional dan sumber-sumber lainnya dari internet, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau kantor terkait berupa profil Kecamatan Bangko Pusako dan profil puskesmas Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako.

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara/interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi/data tentang Implementasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kaki Gajah (Filariasis) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir seperti komunikasi antar pelaksana program dengan masyarakat, sumberdaya, sikap para agen pelaksana dan struktur birokrasi serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Observasi

Menurut Soekartono (2002 : 69) secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang obyek penelitian, seperti : proses pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) di kecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir dan lain-lain.

c. Teknik dokumentasi

Sugiyono (2014 : 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kaki Gajah (Filariasis)

Indonesia menetapkan eliminasi penyakit kaki gajah sebagai salah satu prioritas nasional pengendalian penyakit menular, dengan menerapkan dua strategi utama. Pertama, memutuskan rantai penularan penyakit kaki gajah (filariasis) dengan program pemberian obat

pencegahan massal (popm) penyakit kaki gajah di Kabupaten/Kota Endemis penyakit kaki gajah dan kedua, upaya pencegahan serta membatasi kecacatan dengan melaksanakan program penatalaksanaan penderita penyakit kaki gajah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang implementasi program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, menurut teori yang dikemukakan oleh George Edward III yang mengatakan dalam pandangannya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan menciptakan komunikasi yang baik dan efektif agar tujuan dari program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat atau kelompok sasaran.

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sebagaimana

komunikasi yang terjadi dalam implementasi program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis), maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informen penelitian.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber :

“Program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) yang dilakukan kami bekerja sama terlebih dahulu dengan bidan-bidan desa (posyandu) yang dalam hal ini pihak-pihak posyandu menunjuk kader-kader posyandu untuk memberi tahu kepada masyarakat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (POPM) kaki gajah (filariasis) tersebut, selanjutnya masyarakat diberikan pengetahuan atau informasi tentang bahaya penyakit tersebut dan tata cara minum obat tersebut”.
(Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyampaian kebijakan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) dalam hal ini sebagai pelaksana program tersebut sudah berjalan. Selanjutnya informasi atau komunikasi yang disampaikan mereka laksanakan sesuai dengan perintah yang dibuat, mereka menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Namun belum juga berdampak maksimal bagi masyarakat.

Penyampaian kebijakan yang dilakukan sudah berjalan dengan lancar, namun dalam hal ini penyuluhan dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Menambah pengetahuan masyarakat, dengan penyuluhan tersebut dapat membantu masyarakat agar masyarakat mengerti tata cara dalam meminum obat tersebut. Berikut ini

merupakan kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam hal ini, dilakukan sosialisasi, diberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di posyandu, namun saat penyuluhan berlangsung tidak seluruh masyarakat yang datang sehingga tidak seluruh masyarakat yang tahu tentang tata cara minum obat tersebut. selain itu penyuluhan dilakukan tidak setiap tahun”.
(Wawancara dengan Bidan Desa (Posyandu), 22 Januari 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui penyuluhan yang dilakukan belum menyeluruh, karena tidak semua masyarakat yang hadir. Jadi tidak semua sasaran masyarakat yang tau mengenai program tersebut dan tidak semua sasaran masyarakat yang ta kegunaan obat tersebut bagi masyarakat. Sehingga dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara meminum obat tersebut masih membuat masyarakat merasa takut untuk meminum obat tersebut.

b. Kejelasan

Komunikasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber :

“Sebelum dilaksanakan program pemberian obat kaki gajah tersebut, tim kader posyandu diberikan penyuluhan terlebih dahulu, dimana tujuannya agar petugas pelaksana program tersebut dapat mengetahui prosedur pentingnya program pemberian obat pencegahan kaki gajah tersebut, sehingga informasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran program tersebut tidak salah dan juga

dapat mudah dimengerti oleh masyarakat”.
(Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagai pelaksana program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis), mengetahui dengan jelas tujuan dan prosedur dari program tersebut dilaksanakan khususnya bagi masyarakat. Mereka tahu tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai implementor dari pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis). Bahwa sudah dilakukan pelatihan kepada kader posyandu akan tetapi masih belum berdampak maksimal.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola program sebagai berikut :

“Setelah dapat perintah langsung dari pengelola program pemberian obat kaki gajah puskesmas Kecamatan Bangko Pusako selanjutnya kami dari Bidan Posyandu langsung menunjuk kader-kader Posyandu lalu menyampaikan kepada kader posyandu dan semua pihak bekerjasama dalam pelaksanaan program pemberian obat kaki gajah tersebut.
(Wawancara dengan Bidan Desa (Posyandu), 22 Januari 2018).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa konsistensi, perintah yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan kepada Pihak puskesmas dan kader posyandu dimana dan kapan dilaksanakan program pemberian obat pencegahan

massal (popm) kaki gajah (filariasis) tersebut akan dilaksanakan. Sehingga semua pihak bekerjasama dan bertanggungjawab untuk menyukseskan serta menjalankan pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) tersebut.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempunyai peranan yang sangat penting, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Menurut Edward III, terdapat 4 indikator sumberdaya, yaitu :

a. Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola program sebagai berikut :

“Staf atau pihak dalam pelaksanaan program pemberian obat kaki gajah yang diadakan yaitu dari kader posyandu dan jumlah personil yang ditunjuk setiap desa tersebutlah yang memberikan obat kepada setiap masyarakat yang boleh minum obat tersebut, namun masih terdapat juga masyarakat yang belum minum obat seluruhnya”.
(Wawancara dengan Bidan Desa (Posyandu), 22 Januari 2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa jumlah personil atau pihak yang bertugas dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) dalam hal ini adalah

pihak kader posyandu, namun dengan jumlah personil yang ditugaskan tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan karena masih terdapatnya masyarakat yang belum seluruhnya minum obat tersebut.

b. Informasi

Dalam implementasikan kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, informasi yang diberikan sudah dilaksanakan namun masih belum menyeluruh.

"Dengan mengikuti program pemberian obat kaki gajah tersebut, kami jadi tahu manfaat obat tersebut dan kami juga tahu cara minum obat tersebut dan cara pencegahannya, sehingga dapat bermanfaat untuk kesehatan kami". (Wawancara dengan Masyarakat, 22 Januari 2018).

Tetapi dalam penyampaian informasi program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) peneliti mengamati bahwa penyampaian masih belum sesuai dengan yang diinginkan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informen penelitian sebagai berikut :

"Penyampaian informasi melalui penyuluhan di posyandu kepada masyarakat, di rasa masih kurang bagus. Karena masih belum semua masyarakat yang terlibat atau hadir sehingga tidak seluruh kelompok sasaran yang tahu dan mengerti". (Wawancara dengan Bidan Desa (Posyandu), 22 Januari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penyampaian

informasi program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) masih kurang optimal. Penyampaian informasi terkait program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) sebaiknya seluruh masyarakat yang terlibat karena program ini untuk kepentingan seluruh masyarakat. Karena kerjasama antara pelaksana program dan masyarakat dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) ini sangat dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) ini sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Partisipasi merupakan suatu tindakan yang sangat dibutuhkan, dimana tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu program tidak akan berjalan. Partisipasi masyarakat dalam ini belum seluruhnya ikut berpartisipasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut :

"Sejauh ini masih terdapat masyarakat yang belum minum obat tersebut, masyarakat masih takut minum obat itu karena masyarakat merasa takut, efek dari obat tersebut mual, pusing dan obat-obat tersebut besar-besar. " (Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa meskipun masyarakat meminum obat tersebut, tetapi tidak seluruhnya masih terdapat masyarakat yang tidak meminum obat tersebut. Sementara program ini untuk masyarakat, meskipun masih terdapat masyarakat tidak meminum obat tersebut tetapi pelaksana program filariasis tersebut tetap akan memberikan obat tersebut dan meningkatkan bahwa pentingnya obat tersebut. sehingga

meningkatkan minat masyarakat untuk meminum obat tersebut.

c. Wewenang

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informen penelitian wewenang dalam pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) sudah dijalankan dengan baik, yang dilakukan pengelola program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) sebagai penanggung jawab.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola program sebagai berikut :

"Pengelola program yaitu dari pihak Puskesmas) dan kader posyandu sebagai pelaksana kebijakan program pemberian obat kaki gajah tersebut merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan penanggungjawab dalam program tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi kepada masyarakat menjadi tugas mereka yang dibekali dengan pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu. (Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelola program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) dan kader posyandu merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) karena sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Mereka memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

d. Fasilitas

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang

harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola program sebagai berikut :

"Pelaksanaan program pemberian obat pencegahan kaki gajah bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, mereka menyediakan obat-obat yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena tanpa obat-obat yang disediakan oleh Dinas Kesehatan maka program pemberian obat kaki gajah ini tidak dapat dilaksanakan". (Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui dalam penyediaan obat untuk diberikan kepada masyarakat pihak pengelola program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan. Pihak Dinas Kesehatan yang menyediakan obat tersebut dan diberikan kepada pihak puskesmas untuk diberikan kepada masyarakat. Karena anpa disediakannya obat tersebut oleh Dinas Kesehatan maka program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) tidak dapat untuk dilaksanakan.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung ugur dalam pelaksanaan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan didalam pelaksanaan kebijakan secara efektif.

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila pelaksana yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola program sebagai berikut :

“Kami dari tim pengelola program pemberian obat kaki gajah sebagai pelaksana program mendukung sepenuhnya program ini agar seluruh masyarakat dapat meminum obat tersebut serta agar tidak terdapatnya lagi masyarakat yang terkena kaki gajah di Kecamatan Bangko Pusako karena penyakitnya sangat berbahaya”. **(Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).**

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) mendukung dan siap melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) agar seluruh masyarakat meminum obat tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyakit filariasis.

b. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informen sebagai berikut :

“Terkait dana, dalam hal ini ada dana untuk kader posyandu yang

memberikan obat tersebut karena kader posyandu yang bertugas langsung dalam memberikan obat tersebut secara langsung kepada masyarakat. Namun bagi masyarakat yang dapat atau meminum obat tersebut tidak ada dikenakan biaya atau dana sedikit pun”. **(Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).**

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) ada dana untuk kader posyandu yang memberikan obat tersebut karena merekalah yang memberikan obat tersebut kepada kelompok sasaran dan mereka yang melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran. Namun sebagai kelompok sasaran dalam program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) tersebut mereka tidak dikenai biaya sedikitpun.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

a. Standar Operating Procedures (SOP)

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informen penelitian, sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program pemberian obat kaki gajah ini pihak pelaksana program berpedoman pada buku panduan yang diberikan kepada kader-kader posyandu”. **(Wawancara dengan**

Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaksana program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) memiliki buku panduan sebagai acuan dalam memberikan pengetahuan tentang program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) dan cara memberikan obat tersebut. dan kader posyandu tersebut memahami terlebih dahulu panduan tersebut sebelum diberitahukan kepada masyarakat.

b. Fragmentasi

Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informen penelitian, sebagai berikut :

“Pelaksanaan program pemberian obat kaki gajah berkoordinasi atau bekerja sama dengan dinas kesehatan karena mereka yang menugaskan dalam pelaksanaan program pemberian obat pencegahan kaki gajah tersebut”.
(Wawancara dengan Pengelola Program Filariasis, 17 Januari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pihak pengelola pelaksana program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan karena mereka yang memberikan arahan kepada pihak puskesmas untuk melaksanakan program tersebut dan pihak puskesmas bekerjasama dengan kader posyandu dalam melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) tersebut sehingga program pemberian obat pencegahan massal (popm) kaki gajah (filariasis) dapat dijalankan

dengan baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini di tandai dengan masih terdapatnya masyarakat yang belum meminum obat tersebut secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya di lihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah baik namun belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dengan sumber daya yang ada belum cukup memadai untuk pengimplementasian program. Selain dari itu ada yang sudah menunjukkan peningkatan diantaranya disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana program tersebut didukung sepenuhnya oleh kader posyandu sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan program tersebut dan struktur birokrasi yang ada yang menjadi acuan para kader pelaksana yaitu dengan buku panduan sudah cukup membantu para kader dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengarah pada pelaksanaan yang baik. Maka dalam pengimplementasian program tersebut dibutuhkan pembenahan pada masa mendatang agar mampu mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Ekowati, Mts Roro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Harahap, Marwali. 2000. *Ilmu Penyakit Kulit*. Jakarta : Hipokrates.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Ga-Va Media
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik dan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta
- Namawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya : PMN.
- Nugroho, D. Riant 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- _____. 2014. *Public Policy*. Edisi Kelima *Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*. Jakarta : Prenada Media.
- Solichin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasinya"*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Bandung.
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif), Kuantitatif, dan Modern)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Widoyono. 2008. *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya*. Jakarta : Erlangga.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Centre Of Academic Publishing Service (CAPS)

Internet :

- Rencana Nasional Program Akselerasi Eliminasi Filariasis 2010-2014. Diakses dari : http://pppl.depkes.go.id/_Plan_Filariasis_2010-Ind_2010 2014. (pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 22:55 WIB)
- Konsep Implementasi Program. Diakses dari : http://eprints.ny.ac.id/Bab2_08110241019. (pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 11:46 WIB)